

Daftar Pustaka

1. Buku

- Ali, Ahmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Badruzaman, Marian Darus, 1980, *Perjanjian Baku (standard) Perkembangannya di Indonesia*, pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Mata Pelajaran Hukum Perdata Fakultas Hukum USU, Medan.
- _____, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- _____,dkk, 2001, *Komplikasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bappenas, 2010, *Buku Saku Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur*, Jakarta.
- Budiono, Harlien, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Indonesia*, PT.Cintra Aditya Bakti, Bandung.
- Djumaldi, F.X., 1991. *Perjanjian Pemborongan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku kedua, PT. CitraAditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 1982. *Segi-segi Hukum Kontrak*, Alumni, Bandung.
- Hernoko, Agus Yuda, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- HS, H.Salim dan Erlies Setiana Nurbani, 2013, *Hukum Divestasi di Indonesia (Pasca putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2/SKLN-x/2012)*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta.
- John, D. Calamari dan Joseph M. Perillio, 1997, *Contract, second edition, west publishing Co.*, united states.
- Kansil, 2006, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 2015, *Perbandingan Hukum Kontrak*, Cv. Mandar Maju, Bandung

- Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1987, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Miller, 1999, “*Applying Multiple Project Procurement Methods to a Portfolio of Infrastructure Projects*”, dalam Rowlinson, s. And McDermott, P., *Procurement system: A Guide to Best Practice in Construcyion*, E & FN Spon, London.
- Miru, Ahmadi, 2013, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUH Perdata)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2002, *Hukum Bisnis (Dalam Teori dan Praktik)*, Buku keempat, PT. CitraAditya Bakti, Bandung.
- Niewenhuis, Jacob Hans. 1976. *Hoofstukken Verbintennissenrecht*, Kluwer, Deventer.
- _____, 1979. *Drie Beginselen Van Contractenrech*, Kluwer, Deventer.
- _____, 1985. *Pokok-pokok Perikatan*, Terjemahan oleh Djasadin Saragih, Surabaya.
- R. Setiawan, 1994, *Hukum Perikatan*, Bina Ipta, Jakarta.
- Rawls, Jhon. 1999. *A Theory of Justice*, The Belknp Press of Harvard University Press of Cambridge, Massachussetts.
- Salim, 2011, *Hukum kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satrio, J. , 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Simamora, Yohanes. S., 2013, *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia)*, Laksbang Justitia , Surabaya.
- Simanjuntak, P.N.H., 2007, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1964, *Hukum Badan Pribadi*, PB. Gadjah Mada, Yogyakarta.

Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, PT. Inter Masa, Jakarta.

_____, 1997, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta.

Syah, Mudakir Iskandar, 2015, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Permata Aksara, Jakarta.

Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung.

_____, 1987, *Pokok-pokok hukum perdata*, Intermasa, Jakarta.

Wirjono, Prodjokoddikoro, 1991, *Asas-asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Jakarta.

2. Perundang - Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Undang-undang Nomor 05 Tahun 1960 Tentang Pokok – Pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833).

Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-undang Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkertaapian (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Konstruksi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956).

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Konstruksi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4786).

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Konstruksi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748).

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334).

Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642).

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5565).

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075).

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573).

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 377, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional(Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122).

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330).

Ketentuan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330).

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Skripsi, Tesis

Pianandita, Rizki Wahyu Sinatria, 2009, “Penanganan Sengketa pada Kontrak Konstruksi yang Berdimensi Publik (Tinjauan Hukum Atas Putusan BANI No.283/vii/ARB-BANI/2008)”, *Tesis*, FH UH, Makassar

Septian, Dandi, 2016, Tinjauan Terhadap Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pengguna Barang dan Jasa (Studi Kasus pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2010 – 2015, *Skripsi*, FH UH UGM, Yogyakarta.

Winardi, 2013, “Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) Di PT. PLN (Persero) Area Banjarmasin”, *Tesis*, FH UGM, Yogyakarta

Winata, Aprilia, 2015, “Konsistensi Peraturan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) dan Potensi Peranannya dalam Pencegahan Persekongkolan Tender”, *Tesis*, FH UGM, Yogyakarta

4. Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa departemen pendidikan dan Kebudayaan, 1995 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta.

5. Website :

<http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/sulsel/Pages/Kajian-Ekonomi-dan-Kuangan-Regional-Provinsi-Sulawesi-Selatan-Triwulan-IV-2015-.aspx>. Selasa, 29/03/2016 Pukul 01:38

<http://www.smartcitymakassar.com/2015/12/fokus-pada-infrastruktur-transportasi.html>, Selasa 29/03/2016, pukul 01:48

<https://sinaugeomatika.wordpress.com/2011/12/30/pengadaan-tanah-bagi-pembangunan-untuk-kepentingan-umum-antara-regulasi-dan-implementasi/>
Diakses Pada Tanggal 28 July 2016 Pukul 23.37

<https://sulsel.pojoksatu.id/read/2016/02/08/pembebasan-lahan-kereta-api-makassar-parepare-dilanjutkan/> Pada tanggal 5 Agustus 2016 pukul 22.04

<http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/sulsel/Pages/Kajian-Ekonomi-dan-Kuangan-Regional-Provinsi-Sulawesi-Selatan-Triwulan-IV-2015-.aspx>. Selasa, 29/03/2016 Pukul 01:38